

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia internasional, tentunya negara-negara saling berinteraksi satu sama lain. Apa pun itu interaksinya, baik itu kerja sama maupun konflik, kegiatan politik internasional terjadi karena reaksi dan respons dari satu negara ke negara lainnya (Holsti, 1992). Interaksi tersebut mutlak terjadi karena adanya faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan terjadinya kegiatan politik internasional. Ada pun faktor-faktor tersebut meliputi lingkungan fisik, seperti lokasi geografi, sumber daya alam, dan teknologi suatu bangsa; penyebaran sosial dan perilaku, yang di dalamnya mengandung pengertian sebagai hasil pemikiran manusia sehingga menghasilkan budaya politik serta munculnya kelompok-kelompok elit tertentu; dan timbulnya lembaga-lembaga politik dan ekonomi serta organisasi-organisasi internasional dan perantara-perantara ekonomi serta politik lainnya (Chan, 1985).

Pada umumnya, interaksi dapat dibedakan berdasarkan jumlah pelakunya. Jenis interaksi pertama adalah secara bilateral, di mana interaksi terjadi antara dua negara. Interaksi seperti ini merupakan interaksi yang paling sering ditemukan dalam politik internasional, dan dilihat dari jumlah pelakunya yang hanya terdiri dari dua negara, interaksi jenis ini memberikan pola interaksi yang lebih intim. Jenis interaksi kedua adalah secara trilateral, di mana interaksi terjadi antara tiga negara. Interaksi jenis ini umumnya terjadi karena adanya suatu isu atau permasalahan yang mempengaruhi ketiga negara tersebut. Jenis interaksi ketiga adalah secara multilateral, di mana interaksi terjadi antara empat negara atau lebih. Interaksi jenis ini umumnya terjadi karena adanya isu atau permasalahan yang meliputi wilayah yang sangat luas dan berpengaruh besar terhadap negara-negara tadi. Interaksi secara multilateral bisa kita lihat dalam organisasi-organisasi kawasan (*regional intergovernmental organization*).

Sama seperti di level domestik, interaksi di level internasional mencakup isu ekonomi, militer, politik, sosial budaya, dan lingkungan (Perwita dan Yani, 2014). Interaksi negara-negara dalam isu-isu tersebut didominasi dengan kerja sama, namun tidak menutup kemungkinan interaksi yang terjadi berbentuk konflik, khususnya dalam isu ekonomi dan militer. Dalam isu-isu tersebut, tentunya interaksi terjadi secara resiprokal, di mana akan terjadi hubungan timbal balik (saling merespons) antara negara-negara yang sedang berinteraksi (Perwita dan Yani, 2014). Dan tentunya, masing-masing negara akan merespons interaksi negara lain berdasarkan serangkaian kebijakan luar negeri yang tersusun atas kepentingan-kepentingan nasionalnya.

Sebagai salah satu interaksi dalam dunia internasional, bantuan luar negeri menjadi salah satu alat atau instrumen kebijakan luar negeri yang semakin populer. Bagaimana tidak, dalam menghadapi sebuah konflik, biaya yang dibutuhkan sebuah negara jika ingin merespons dengan cara kekerasan jauh lebih mahal daripada dengan cara lembut atau non-kekerasan. Amerika Serikat contohnya, yang pada tahun 2013 mengeluarkan 735.4 miliar dolar AS untuk keperluan militernya, sedangkan untuk bantuan luar negeri, Amerika Serikat hanya mengeluarkan 39.6 miliar dolar AS. Besarnya pengeluaran militer Amerika Serikat saat itu diakibatkan oleh banyaknya komponen pertahanan Amerika Serikat yang perlu dirawat, belum lagi penambahan alutsista baru, biaya kesehatan angkatan bersenjata, hingga biaya-biaya operasional lainnya. Karena alasan inilah negara mana pun pasti akan menghindari perang dan lebih memilih cara lembut untuk mempengaruhi negara lain ataupun untuk menyelesaikan konflik, seperti bantuan luar negeri, sanksi ekonomi, dan diplomasi personal (Goldstein dan Pevehouse, 2014).

Australia, sebagai negara yang sudah maju baik di sisi ekonomi maupun sosial, menjadi salah satu negara yang sangat mampu dalam memberikan bantuan luar negeri. Bagaimana tidak, perekonomian Australia hampir tidak pernah menurun. Hal ini bisa dilihat dari produk domestik bruto (PDB) Australia yang terus meningkat pada tahun 2002 sampai tahun 2008, begitu pun dengan pendapatan nasional brutonya (PNB). Pencapaian tersebut menempatkan Australia di peringkat ke-14 dalam kategori PDB dan PNB terbesar di dunia tahun 2008 (World Bank, 2008). Selain itu, Australia juga belum

pernah lagi mengalami resesi sejak tahun 1992. Dengan perekonomiannya ini, Australia menjadi negara yang ideal dan mampu dalam memberikan bantuan luar negeri.

Dalam sejarahnya, bantuan luar negeri sudah diberikan Australia bahkan ketika Australia belum memiliki badan khusus yang bertugas untuk mengelolanya. Bantuan luar negeri Australia pertama yang tercatat diberikan kepada Papua Nugini pada tahun 1950-an (Sherlock, 1991). Saat itu, hampir seluruh bantuan luar negeri Australia diberikan kepada Papua Nugini. Di luar Papua Nugini, bantuan luar negeri Australia diberikan kepada negara-negara tetangga Australia yang berada di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Dengan tidak adanya badan khusus saat itu, bantuan luar negeri Australia diberikan melalui kementerian-kementeriannya. Adapun bantuan luar negeri yang diberikan Australia kepada Papua Nugini saat itu disalurkan oleh Departemen Wilayah Eksternal Australia (*Australian Department of External Territories*). Untuk negara-negara selain Papua Nugini, bantuan luar negeri disalurkan melalui Departemen Luar Negeri Australia (*Australian Department of Foreign Affairs*).

Setelah kurang lebih dua puluh tahun, tepatnya tahun 1974, Australia akhirnya mendirikan badan khusus untuk mengelola seluruh bantuan luar negeri yang diberikan oleh Australia. Pemerintahan Perdana Menteri Whitlam saat itu menamai badan ini *Australian Development Assistance Agency* (ADAA). Dengan adanya ADAA, seluruh bantuan luar negeri yang sebelumnya disalurkan oleh kementerian-kementerian Australia kini dikelola oleh ADAA. Seiring dengan berjalannya waktu, ADAA pun mengalami beberapa kali perubahan nama dan struktur organisasi. Perubahan pertama dilakukan pada tahun 1976 di bawah pemerintahan Perdana Menteri Fraser. Perubahan tersebut mengganti nama ADAA menjadi *Australian Development Assistance Bureau* (ADAB) dan mengubah penempatannya dari yang sebelumnya merupakan badan hukum menjadi di bawah Departemen Luar Negeri Australia. Tidak berhenti di situ, badan khusus bantuan luar negeri Australia tersebut pun kembali diubah di bawah pemerintahan Perdana Menteri Hawke tahun 1987 menjadi *Australian Internasional Development Assistance Bureau* (AIDAB). Meskipun penempatan AIDAB tetap di bawah Departemen Luar Negeri Australia, namun kali ini Direktur AIDAB bertanggungjawab langsung kepada perdana menteri dan biro tersebut memiliki otonomi dalam hal kepegawaian dan sumber daya. Perubahan berikutnya terjadi di

tahun 1995 di bawah pemerintahan Perdana Menteri Keating di mana AIDAB berubah nama menjadi *Australian Agency for International Development* (AusAID). Dan akhirnya pada tahun 2013, nama AusAID diubah menjadi *Australian AID* dan strukturnya tidak lagi independen, melainkan menjadi bagian dari Departemen Luar Negeri Australia.

Dalam melaksanakan tugasnya, AusAID memiliki target-target yang sudah ditentukan sebelumnya dan *Millenium Development Goals* (MDG) yang digagas oleh Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 2000 menjadi salah satu target AusAID. Kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sanitasi, infrastruktur, dan perubahan iklim menjadi beberapa fokus AusAID di tahun 2008 (AusAID, 2009). Target dari bantuan luar negerinya pun berfokus kepada negara-negara tetangga Australia yang berada di Asia dan Pasifik. Terkait pelaksanaannya, Australia telah berkontribusi dalam memenuhi poin satu sampai poin delapan MDG di kawasan Asia dan Pasifik. Bencana alam pun menjadi salah satu kunci permasalahan yang ditangani oleh AusAID. Tentunya seluruh target-target AusAID ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan yang sejalan dengan kepentingan nasional Australia.

Indonesia, sebagai negara yang secara geografis berdekatan dengan Australia, memiliki puluhan bahkan ratusan permasalahan yang disebabkan oleh bencana alam. Salah satu dari sekian banyaknya bencana alam yang mengancam Indonesia adalah tsunami. Pada tahun 2004, tercatat ada 803 kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia di mana kejadian tsunami hanya terjadi sebanyak 22 kali (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2008). Dalam kurun waktu 4 tahun setelahnya, kejadian bencana alam mengalami penurunan lalu peningkatan kembali di tahun 2008 dengan kejadian bencana alam berjumlah 1,118 kejadian sedangkan tsunami tidak terjadi sama sekali. Meskipun begitu, perlu ditekankan bahwa kejadian tsunami merupakan kejadian yang sangat jarang terjadi dan bergantung pada pemicunya. Terlepas dari jumlah kejadian yang terbilang kecil, kejadian tsunami tetap menjadi kejadian yang menelan korban jiwa terbanyak meskipun jika dibandingkan dengan jumlah korban gabungan dari bencana alam lainnya. Hal ini terlihat dari statistik korban jiwa yang dipublikasikan oleh BNPB melalui situs Data Informasi Bencana Indonesia atau DIBI di mana pada tahun 2004, terdapat 173,358 jiwa yang meninggal atau hilang karena kejadian bencana

alam sedangkan korban jiwa yang diakibatkan oleh kejadian tsunami berjumlah 172,915 jiwa (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2008).

Terkait ancaman kejadian tsunami itu sendiri, hal ini tidak lain disebabkan karena posisi Indonesia yang berada dalam *Pacific Ring of Fire* atau Cincin Api Pasifik. Cincin Api Pasifik merupakan sebutan bagi gunung-gunung api aktif yang berderet sepanjang Asia-Pasifik. Sebetulnya, yang menjadi penyebab banyaknya ancaman kejadian tsunami di Indonesia bukanlah karena deretan gunung api ini, melainkan karena situasi geologis yang memberikan julukan nama Cincin Api Pasifik ini. Adalah lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Laut Filipina yang mengelilingi dan mewadahi Indonesia secara geologis. Adanya keempat lempeng yang saling bertemu ini membuat Indonesia dikelilingi oleh zona-zona pertemuan lempeng tektonik. Zona-zona pertemuan inilah yang menjadikan Indonesia rawan terkena kejadian tsunami (Tim Pusat Studi Gempa Nasional, 2017). Dan perlu diketahui juga bahwa menurut Bryant (2008), zona-zona pertemuan lempeng, atau yang disebut juga dengan batas lempeng konvergen, merupakan jenis zona interaksi lempeng yang paling banyak menghasilkan gempa bumi dengan daya hancur yang tinggi. Melihat keadaan ini, maka kejadian tsunami menjadi ancaman besar bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal dekat dengan daerah pantai.

Dengan adanya ancaman kejadian tsunami, sudah sepantasnya bagi Pemerintah Indonesia untuk memiliki kapasitas yang mumpuni dalam menanggulangnya, tidak terkecuali dalam bidang teknologi. Dalam kejadian tsunami, tentu struktur pantai, penataan wilayah, dan sistem yang terpadu sangat diperlukan untuk meringankan dampak dari kejadian tsunami (Sutowijoyo, 2005). Namun, hal penting lainnya yang sangat vital dalam penanggulangan kejadian tsunami adalah informasi. Hingga saat ini, tidak ada cara bagi manusia untuk mencegah terjadinya kejadian alam, terutama tsunami. Maka, yang dapat dilakukan adalah mengurangi kerentanannya dengan mengambil langkah-langkah pencegahan, seperti tidak tinggal di daerah pantai yang diketahui pernah dilanda kejadian tsunami, meningkatkan kesadaran masyarakat akan ancaman kejadian tsunami, serta membuat jalur evakuasi. Di sinilah teknologi memegang peranan yang sangat penting, di mana teknologi dapat mendeteksi dan memonitor kejadian tsunami. Pendeteksian dan pemantauan menjadi senjata utama

manusia dalam menyaiasi kejadian tsunami, karena dengan mendeteksi dan memonitor perairan daerah tersebut, setiap kejadian yang dapat memicu terjadinya gelombang tsunami dapat langsung dideteksi dan informasi tersebut dapat langsung disampaikan kepada masyarakat yang akan terdampak. Dengan begitu, masyarakat yang berada di daerah tersebut dapat langsung melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Hal ini disebut juga dengan peringatan dini. Sebelum kejadian gempa bumi yang disusul tsunami di Aceh tahun 2004, sangat disayangkan bahwa alat pendeteksian dan monitor tsunami di Indonesia masih jauh dari kata memadai. Menurut Harjadi dan Fauzi (2010), alat yang digunakan untuk mendeteksi kejadian tsunami sebelum kejadian tsunami Aceh tahun 2004 bergantung sepenuhnya pada jaringan seismograf yang tersebar di seluruh Indonesia. Terdapat setidaknya 30 stasiun geofisika yang dioperasikan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) yang mengendalikan keseluruhan seismograf di Indonesia saat itu. Sangat disayangkan bahwa instrumen yang dimiliki Pemerintah Indonesia saat itu sangatlah minim. Hal tersebut berdampak langsung yang mana tidak adanya peringatan dini yang diberikan kepada masyarakat ketika kejadian tsunami di Aceh terjadi (Giles dan Marris, 2004).

Bersamaan dengan kurangnya instrumen pendeteksian tsunami tersebut, kurangnya kapasitas institusi penanggulangan bencana Indonesia saat itu, Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP) membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, presiden keenam Indonesia yang mulai menjabat dari bulan Oktober 2004, membentuk Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana atau BAKORNAS PB (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2019). Sayangnya, perubahan institusi penanggulangan bencana tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan. Hal ini terlihat dari status BAKORNAS PB yang masih belum setingkat dengan menteri. Tidak hanya itu BAKORNAS PB masih berbentuk forum koordinasi antar menteri di mana kepemimpinan dari BAKORNAS PB merupakan menteri/pemimpin lembaga lain (World Bank, 2009). Inilah yang membuat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu mengeluarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bersamaan dengan undang-undang tersebut, fokus pemerintah pun sudah tidak lagi hanya kepada penanggulangan, namun juga kepada

pengurangan risiko dari bencana tersebut. Dan dengan undang-undang ini, pemerintah juga memberikan landasan bagi terbentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Adapun ketentuan-ketentuan berikutnya mengenai BNPB dijelaskan dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dengan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB resmi dibentuk pada tanggal 26 Januari 2008. Secara struktural, BNPB menjadi lembaga pemerintah nondepartemen setingkat menteri dan bertanggungjawab langsung kepada presiden. Dalam pelaksanaannya, BNPB dipimpin oleh seorang kepala dan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Lebih lagi, mengingat BNPB menjadi lembaga resmi yang mengelola segala upaya negara dalam mengurangi risiko dan penanggulangan bencana, BNPB memiliki fungsi untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Selain itu, BNPB juga berkewajiban untuk menggunakan dan mempertanggungjawabkan segala jenis sumbangan atau bantuan yang diberikan, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Dengan adanya BNPB, pengurangan maupun penanggulangan bencana di Indonesia diharapkan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan lebih terkoordinasi. Dengan disahkannya UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta dibentuknya BNPB, keseriusan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memperbaiki kapasitas penanggulangan bencana Indonesia semakin terwujud.

Keseriusan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana Indonesia pun semakin terlihat ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kevin Rudd di sela-sela pertemuan pimpinan APEC yang ke-20 di Lima, Peru pada tanggal 22-23 November 2008 (Angga, 2008). Adapun pertemuan bilateral tersebut membahas tentang kerja sama Indonesia dengan Australia dalam hal pengurangan risiko dan penanggulangan bencana, sektor yang juga menjadi pokok bahasan dalam pertemuan pimpinan APEC tersebut. Kedua belah pihak pun setuju untuk membentuk sebuah fasilitas yang berfungsi sebagai pusat peningkatan kapasitas

pengurangan risiko dan penanggulangan bencana bagi Indonesia dan kawasan Asia. Fasilitas tersebut dinamakan dengan *Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction* (AIFDR).

Adapun Adapun berdasarkan aturan tambahan terkait AIFDR fase 1 yang penulis temukan, AIFDR fase 1 secara sah mulai beroperasi pada tanggal 9 Juli 2009 dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 yang mana masa ini diperpanjang melalui amandemen pertama terhadap aturan tambahan tersebut menjadi 30 Juni 2015. Tujuan utama dari AIFDR adalah untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana Indonesia di tingkat nasional dan lokal, dan untuk mempromosikan Indonesia dan kawasan yang lebih tahan bencana. Fasilitasnya itu sendiri akan membawa kolaborasi kedua pihak ke arah solusi ilmiah yang inovatif, pembangunan kapasitas, dan analisis ke depan untuk menyiapkan mitigasi bencana, kesiapan, dan respons Indonesia dan kawasan yang lebih efektif. Hal ini akan dicapai melalui tiga fokus kerja utama, yaitu *research and analysis* (penelitian dan analisis), *risk and vulnerability* (risiko dan kerentanan), dan *training and outreach* (pelatihan dan penyebaran). Meskipun pendanaan fasilitas ini pada dasarnya merupakan donor atau bantuan dari pemerintah Australia melalui AusAID, namun fasilitas ini juga merupakan kerja sama mengingat kepemimpinan dari fasilitas ini yang melibatkan kedua belah pihak.

Tentunya terdapat beberapa alasan mengapa Australia prihatin terhadap dan mau bekerja sama dalam meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di Indonesia. Berdasarkan temuan yang penulis himpun dari draf desain AIFDR fase 2 (Australian Department of Foreign Affairs and Trade; Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia, 2014), alasan Australia prihatin dan mau bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu kemanusiaan dan politik. Dalam hal kemanusiaan, kesiapsiagaan terhadap dan menanggapi bencana dan krisis kemanusiaan merupakan salah satu tujuan strategis dari program bantuan Australia. Selain itu, membangun ketahanan yang terdiri dari bantuan kemanusiaan, pengurangan risiko bencana, dan perlindungan sosial merupakan salah satu dari enam area prioritas kebijakan pembangunan pemerintah Australia. Dengan kebijakan pengurangan risiko bencana Departemen Luar Negeri Australia yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan negara-negara lain terhadap

bencana, maka prioritas kemanusiaan pemerintah Australia meluas ke negara lain (Australian Department of Foreign Affairs and Trade; Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia, 2014). Fokus pada kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap bencana di kawasan Indo-Pasifik pun sangat penting bagi Australia. Indonesia, sebagai salah satu tetangga terdekat Australia dan mitra bilateral yang penting, menjadi prioritas dalam fokus Indo-Pasifik ini (Australian Department of Foreign Affairs and Trade; Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia, 2014). Tentunya hal ini terbukti dari banyaknya bantuan yang diberikan Australia ketika Indonesia dilanda tsunami pada tahun 2004 di Aceh dan 2006 di Mentawai.

Tidak hanya alasan kemanusiaan, alasan Australia prihatin dan mau bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di Indonesia juga didasari atas alasan politik, terutama ketika berbicara tentang hubungan bilateral. Hal ini dapat dilihat dari bantuan-bantuan kemanusiaan yang Australia berikan, dan salah satunya adalah dalam AIFDR fase 1 ini. Dana hibah yang diberikan oleh Australia untuk membiayai AIFDR fase 1 ini, yang mana sebesar 67 juta dolar AS, merupakan dana hibah terbesar yang diterima Indonesia dalam sektor manajemen risiko bencana saat itu (Australian Department of Foreign Affairs and Trade; Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia, 2014). Dengan ini, Australia tentunya mendapatkan keuntungan kompetitif, di mana kemampuan, keahlian, dan komitmen pemerintah Australia akan sangat dinilai. Tentunya dengan bantuan ini, hubungan bilateral Indonesia dengan Australia akan semakin erat dan menempatkan Australia sebagai teman yang berharga ketika bencana terjadi lagi. Dan seperti yang disinggung sebelumnya, Australia memiliki fokus bantuan luar negeri kepada negara-negara di Asia Tenggara dan Pasifik, dan kerja sama dengan Indonesia di bidang manajemen risiko bencana ini menjadi kunci untuk mewujudkan negara tetangga yang lebih aman, lebih sejahtera, bersatu, dan demokratis (Australian Department of Foreign Affairs and Trade; Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia, 2014). Dengan alasan kemanusiaan dan politik tadi, sudah sewajarnya Australia prihatin terhadap dan setuju untuk bekerja sama dalam meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana Indonesia.

Australia itu sendiri tentunya merupakan mitra kerja sama yang cocok dalam hal peningkatan kapasitas penanggulangan bencana. Selain karena memiliki kapasitas

penanggulangan bencana yang mumpuni, secara geografis Australia berada di lokasi yang berdekatan dengan Indonesia. Hal ini tentunya menjadi nilai tambah, karena kedekatan secara geografis membuat kedua negara merasakan dan memiliki pandangan yang hampir sama dalam hal fenomena alam. Tidak hanya itu, bantuan luar negeri ini pun diberikan pada momen yang sangat tepat, di mana BNPB yang baru resmi dibentuk masih memiliki banyak kekurangan, begitu pun dengan kapasitas penanggulangan bencana Indonesia masih minim. Maka dari itu, penulis berkeinginan untuk mengambil kerja sama AIFDR fase 1 sebagai penelitian penulis dan bertujuan untuk melihat bagaimana dampak yang diberikan dari kerja sama AIFDR fase 1 tersebut.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apa dampak dari AIFDR Fase 1 periode 2009-2015 terhadap kapasitas teknologi Indonesia dalam menanggulangi kejadian tsunami?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menjelaskan dampak dari AIFDR Fase 1 periode 2009-2015 terhadap kapasitas teknologi Indonesia dalam menanggulangi kejadian tsunami.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan penjelasan rinci terkait dampak dari AIFDR fase 1 terhadap kapasitas teknologi Indonesia dalam menanggulangi kejadian tsunami. Adapun penjelasan terkait AIFDR fase 1 ini akan dijelaskan dengan cara membedakan kapasitas teknologi, khususnya dalam mendeteksi dan memonitor, yang dimiliki Indonesia dalam menanggulangi kejadian tsunami saat sebelum dan sesudah AIFDR fase 1 dilaksanakan. Selain itu, menggunakan teori-teori yang sudah ada, penelitian

ini akan memberikan penjelasan terkait kerja sama yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia tersebut.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi masyarakat terkait kapasitas teknologi Indonesia dalam menanggulangi kejadian tsunami. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan pemerintah dalam melakukan kerja sama di bidang penanggulangan bencana.

1.5. Sistematika Penulisan

1) BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan latar belakang dari penelitian yang penulis lakukan melalui latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2) BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, penulis akan mengulas literatur-literatur yang penulis gunakan sebagai pembanding akan penelitian penulis, serta menjelaskan teori dan konsep yang penulis akan gunakan dalam melakukan penelitian. Adapun teori dan konsep tersebut adalah teori bantuan luar negeri; konsep kerja sama internasional; dan konsep penanggulangan bencana.

3) BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan waktu serta lokasi penelitian.

4) BAB IV: Kapasitas Teknologi Indonesia dalam Menanggulangi Kejadian Tsunami Periode 2004-2008

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan kapasitas teknologi Indonesia dalam menanggulangi kejadian tsunami dalam periode 2004-2008.

5) BAB V: Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction Fase 1 Periode 2009-2015 dan Dampaknya terhadap Kapasitas Teknologi Indonesia dalam Menanggulangi Kejadian Tsunami Periode 2016-2019

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan AIFDR fase 1, bantuan luar negeri Australia kepada Indonesia yang berbentuk fasilitas dan bekerja sama dengan Indonesia dalam pelaksanaannya. Setelah itu, penulis akan menjelaskan dampak dari AIFDR fase 1 terhadap kapasitas teknologi Indonesia dalam menanggulangi kejadian tsunami pada periode 2016-2019.

6) BAB VII: Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan kesimpulan dari penelitian penulis dan saran-saran yang penulis anggap bisa berguna.